

Difitisme Arab: Awal Mula Kemunduran Arab Dan Dampaknya Terhadap Geobudaya Dan Geopolitik Dunia Arab

Us'an¹, Yoyo², Mastur³, Suroto⁴ Unaimah Sanaya⁵
Studi Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespodensi: usanazim75@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 21-11-2025
Disetujui 01-12-2025
Diterbitkan 03-12-2025

ABSTRACT

What is really happening in the Arab world, despite the fact that this nation has achieved its glory for seven centuries? The problems facing the Arab nation are diverse, ranging from economic inequality to a crisis of cultural identity. Sykes-Picot In 1916, the Arab states, prone to internal conflict, were born. This agreement aimed to regulate their respective zones of influence in the Middle East and divide the Ottoman Empire. Britain also officially declared its support for the establishment of the State of Israel in the Palestinian territories. The birth of the State of Israel in 1948 marked a new chapter in the world political map, particularly in the Middle East. Therefore, deficientism led to the marginalization of the Islamic-Arab intellectual and cultural heritage. This research uses a literature review by taking several references from several journals, books, and various literature that support this research topic. The collected data was then interpreted to arrive at the research objectives. Based on the research results, it was found that deficientism had a direct impact on changes in the geopolitical constellation in the Arab region. In the geopolitical context, Arab countries were no longer active subjects in the international arena, but instead became objects of global interest. Furthermore, deficientism also impacted geoculture, where cultural values experienced erosion due to the penetration of foreign cultures, global economic domination, and an identity crisis.

Keywords: Arab Deficitism, the Establishment of Israel, Geopolitics and Geoculture

ABSTRAK

Apa sebenarnya yang terjadi di dunia arab, padahal selama tujuh abad bangsa ini mencapai kejayaannya. Permasalahan yang dihadapi bangsa arab sangat beragam, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga krisis identitas budaya. Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, menjadi awal lahirnya negara-negara Arab yang rawan terjadi konflik internal. Perjanjian ini bertujuan mengatur zona pengaruh masing-masing di timur tengah dan membagi wilayah Utsmaniyah. Inggris juga secara resmi menyatakan dukungan pendirian negara Israel di wilayah Palestina. Lahirnya Negara Israel pada tahun 1948 merupakan babak baru dalam peta politik dunia, khususnya di timur tengah. Oleh karena itu, difitisme menyebabkan marginalisasi terhadap warisan intelektual dan kebudayaan Islam-Arab. Penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengambil beberapa referensi yang bersumber dari beberapa jurnal, buku, dan berbagai literatur yang mendukung topik penelitian ini. Data yang telah terkumpul kemudian diinterpretasi hingga sampai pada tujuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Difitisme berdampak langsung pada perubahan konstelasi geopolitik di kawasan Arab. Dalam konteks geopolitik negara Arab tidak lagi menjadi subjek aktif di dalam arena internasional, melainkan menjadi objek tarik menarik kepentingan global. Selain itu difitisme juga berdampak pada Geobudaya, di mana nilai budaya tersebut mengalami erosi akibat penetrasi budaya asing, dominasi ekonomi global, dan krisis identitas.

Keywords: Difitisme Arab, Berdirinya Israel, Geopolitik dan Geobudaya

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Us'an, Yoyo, Mastur, Suroto, & Unaimah Sanaya. (2025). Difitisme Arab: Awal Mula Kemunduran Arab Dan Dampaknya Terhadap Geobudaya Dan Geopolitik Dunia Arab. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(1), 20-31. <https://doi.org/10.63822/eZR3yg28>

PENDAHULUAN

Apa sebenarnya yang terjadi di dunia arab selama tiga dekade terakhir adalah puncak kemunduran bangsa Arab dalam era modern. Kemunduran itu serta-merta menjadi rangkaian kemunduran yang luar biasa peradaban bangsa Arab selama tujuh abad terakhir. Sebelumnya, kita tahu bahwa bangsa Arab membawa bendera agama Islam tercatat pernah meraih kejayaan selama tujuh abad yaitu dari abad ke-7 hingga abad ke-14. Pada periode ini ditandai dengan dimulainya, pertumbuhan, integrasi, pusat kemajuan di dunia Islam. Ilmu pengetahuan, agama, budaya, dan juga peradaban Islam berkembang dengan sangat pesat selama periode ini. Ulama terkemuka termasuk Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Hambal, dan Imam Syafi'i muncul dalam bidang fikih, bersama dengan tokoh-tokoh terkemuka dari bidang tasawuf dan teologi. Al-Kindi, al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawaih tokoh yang melambangkan bidang filsafat, sedangkan Ibnu Hayyam, al-Khawarizmi, al-Mas'udi, dan al-Razi merupakan lambang ilmu pengetahuan (Mindani, Ismail, Purwanto Revaldo, Hidayat et al., 2024). Selain itu, kemajuan ini juga ditandai dengan meluasnya pengaruh dan kekuasaan bangsa Arab yang semula hanya berbasis di wilayah Hijaz (bagian wilayah Arab Saudi saat ini), kemudian merambah ke wilayah Afrika Utara, Irak, Iran, wilayah Syam (Palestina, Suriah, Lebanon, dan Jordania saat ini), Turki, Asia Tengah, Asia Selatan, dan Tenggara, serta Balkan. Bangsa Arab bahkan pernah berkuasa di Andalusia (wilayah Spanyol sekarang).

Akan tetapi, Setelah abad ke-14 peradaban bangsa Arab mengalami kemerosotan luar biasa bahkan sampai saat sekarang ini. Kemunduran Islam saat ini, sesuai dengan teori Ibnu Khaldun yang menyatakan setiap dinasti memiliki siklus hidup alamiah. Tahun-tahun awal ditandai dengan pertumbuhan yang ekspansif, dipenuhi etos kerja keras dan hampir tidak ada keinginan memiliki kemewahan duniawi. Generasi kedua melanjutkan peninggalan para pendiri, namun pertumbuhannya melambat saat para pemimpin mulai lebih menekankan pada kemewahan hidup alih-alih pada administrasi dan kepemimpinan. Pada generasi ketiga, pembusukan dinasti terjadi secara menyeluruh saat pemimpin dan wazir dikuasai oleh kemewahan dan kesenangan sampai-sampai negara tidak dapat melindungi diri dari ancaman internal atau eksternal karena kelalaian para penguasa (Sudin Yamani, Indo Santalia, 2022).

Pada era modern setelah berakhirnya kolonialisme di dunia Arab sejatinya menjadi momentum yang pas untuk kebangkitan kembali dunia Arab, seperti keberhasilan Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura yang meraih kemajuan pasca-era kolonial. Namun, justru sebaliknya bangsa Arab semakin mengalami kemunduran pada era modern ini. Pada era modern pertama, persisnya setelah era kolonial Barat pada tahun 1940-an dan 1950-an, bangsa Arab optimistis bisa bangkit lagi. Namun, nyatanya bangsa Arab saat itu segera pula merasakan adanya konspirasi besar dari kolonial Barat yang menghambat kebangkitan kembali mereka dan bahkan memecah belah antar-sesama bangsa Arab (Musthafa Abd Rahman, 2019). Konspirasi tersebut dimulai dengan berdirinya negara Israel pada tahun 1948.

Pada era modern kedua atau tepatnya tahun 1960-an, bangsa Arab menggemakan ideologi nasionalisme Arab yang dipimpin oleh seorang Presiden Mesir bernama Gamal Abdel Nasser dalam upaya menyatukan bangsa Arab melawan imperialisme Barat yang dituduh berada di balik konspirasi terhadap bangsa Arab. Namun, gerakan nasionalisme Arab gagal pula membawa kemajuan bangsa Arab, dan bahkan bangsa Arab kalah dalam perang Arab-Israel tahun 1967. Perang ini berlangsung selama enam hari yang melibatkan 4 gabungan negara Arab (Mesir, Yordania, Suriah, dan Irak), yang juga disokong negara Arab lain, seperti Kuwait, Arab Saudi, Aljazair, dan Sudan.

Negara Arab ini berhadapan dengan Israel. Sementara itu, dua kekuatan besar Amerika Serikat dan Uni Soviet, disinyalir juga terlibat secara tak langsung dalam Perang Enam Hari. Perang ini berakhir pada 10 Juni 1967 setelah gencatan senjata yang dimediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Israel berhasil

menguasai Tepi Barat, Jalur Gaza, Yerusalem Timur, Dataran Tinggi Golan, dan Semenanjung Sinai. Wilayah Israel bertambah tiga kali lipat, sehingga menyebabkan sekitar satu juta warga Arab di bawah kontrol mereka. Keberhasilan ini tidak hanya memperluas wilayah Israel tetapi juga memperkuat posisi geopolitik mereka di Timur Tengah. Sementara itu, melansir Kompas.com, dampak Perang Enam Hari bagi warga sipil telah merenggut nyawa banyak manusia. Sekitar 20.000 orang Arab dan 800 orang Israel tewas (Ahmad Yasin, 2025).

Seusai perang Arab-Israel tepatnya tahun 1973, bangsa Arab mulai mengubah pola pikir terhadap Israel dan Amerika Serikat. Bangsa Arab yang dipimpin Presiden Mesir Anwar Sadat pada saat itu mulai menerima negara Israel sebagai negara tetangga dan bagian dari wilayah Timur Tengah, serta mulai mendekati pula AS sebagai sekutu Israel. Perubahan pola pikir itu yang mengantarkan tercapainya kesepakatan damai Mesir-Israel di Camp David, AS tahun 1979. Akibat adanya interaksi positif dengan Barat, sejumlah negara Arab mulai pula menerapkan sistem demokrasi meskipun sangat terbatas, yang ditandai dengan diizinkan berdirinya partai politik. Mesir, Sudan, Yaman, dan Aljazair saat itu membuka keran demokrasi terbatas dengan mengizinkan beroperasinya partai-partai politik. Jordania dan Maroko, yang menerapkan sistem monarki mutlak, juga memberi peran lebih besar kepada partai-partai politik di dua negara tersebut. Namun, reformasi politik yang dilakukan negara-negara Arab pada era itu disebut setengah hati atau sangat tanggung sehingga gagal pula membawa kemajuan dan kemakmuran rakyatnya (Musthafa Abd Rahman, 2019). Oleh karena itu, analisis terhadap difitisme sebagai akar ideologis dari disintegrasi Dunia Arab menjadi penting untuk memahami krisis multidimensi yang sedang berlangsung. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan pokok berikut: Apa yang dimaksud dengan difitisme dalam konteks Dunia Arab, dan bagaimana sejarah kemunculan difitisme? Bagaimana difitisme berperan dalam proses disintegrasi sosial-politik dan budaya Dunia Arab? Apa dampak difitisme terhadap geobudaya dan geopolitik di kawasan Arab sampai saat ini?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data yang berkaitan dengan pembahasan judul penelitian. Ciri pada penelitian ini yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep kemudian pemberian pemahaman dan penjelasan dari hasil yang menjadi objek deskripsi. Penelitian kepustakaan merupakan suatu metode yang digunakan dengan penelaahan buku-buku atau jurnal dengan tema yang dibahas. Adapun data primer penelitian ini adalah literatur yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yaitu difitisme dunia Arab, sementara itu, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai literatur-literatur yang melengkapi isi interpretasi tentang tema penelitian tersebut, seperti buku, internet, jurnal internasional dan jurnal ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Bangsa Arab Sebelum Dfitisme (perjanjian Sykes-Picot)

Kondisi sosial-politik dunia Arab saat ini tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonialisme yang telah membentuk batas negara secara arbitrer tanpa mempertimbangkan kesatuan etnis, agama, atau identitas budaya. Beberapa studi menunjukkan bahwa kolonialisme memiliki dampak jangka panjang yang sangat kompleks bagi bangsa Arab, baik positif maupun negatif. Modernisasi yang dibawa oleh kolonialisme seringkali disertai dengan dominasi budaya dan politik yang merusak tatanan tradisional bangsa Arab itu sendiri. Di sisi yang lain, kolonialisme memicu berbagai gerakan nasionalisme dan reformasi masyarakat Islam yang berusaha mengembalikan kedaulatan dan identitas mereka. Oleh karena itu, problem yang

dihadapi oleh negara Arab pasca-kolonialisme sangat beragam, mulai dari ketimpangan ekonomi hingga krisis identitas budaya. Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, menjadi dasar lahirnya negara-negara Arab modern yang rawan terjadi konflik internal dan ketergantungan kepada eksternal. Perjanjian Sykes-Picot ini bertujuan untuk mengatur zona pengaruh masing-masing di Timur Tengah dan membagi wilayah Utsmaniyah.

Perjanjian yang ditandatangani pada 16 Mei 1916 ini membagi wilayah Arab bekas Utsmaniyah menjadi zona pengaruh. Mark Sykes mewakili Britania Raya dengan membuat garis-garis pembagian wilayah yang memberikan kendali kepada Britania Raya atas Yordania dan sebagian Mesopotamia yang sekarang bagian dari Irak. Francois Georges-Picot mewakili Prancis, merencanakan pengaruh mereka di Suriah, Lebanon, dan bagian Mesopotamia lainnya. Sementara wilayah Palestina akan ditentukan pada kemudian hari, dalam hal ini akan ditentukan oleh Liga Bangsa-Bangsa (Fauzan Ibnu P, 2023). Mirisnya lagi kesepakatan Sykes-Picot dibuat tanpa mempertimbangkan aspirasi nasionalisme Arab. Bahkan, Inggris memanfaatkan gerakan Arab sebagai alat untuk merusak pengaruh Kesultanan Utsmaniyah di Timur Tengah. Strategi utamanya mendorong pemberontakan bangsa Arab melalui tokoh kunci yang bernama Sharif Hussein bin Ali, Gubernur Mekkah, yang memiliki ambisi pribadi menjadi Khalifah dunia Arab.

Pada bulan Juni 1916, Sharif Hussein memimpin pemberontakan melawan Khilafah Utsmaniyah. Dalam waktu singkat, pasukannya dengan dukungan besar dari Inggris berupa tentara, senjata, dan sebagainya, berhasil merebut kota-kota penting di Hijaz, termasuk Mekkah dan Jeddah. Mereka menggunakan Bendera Perlawanan Arab yang didesain oleh Inggris, kemudian menginspirasi beberapa bendera negara Arab modern, hingga pada tahun 1918, pasukannya berhasil menguasai kota-kota besar seperti Yerusalem, Bagdad, Amman, dan Aqaba. Makar yang dilakukan oleh Sharif Hussein bersama Inggris untuk melawan Kesultanan Utsmaniyah berujung pengkhianatan. Inggris diam-diam membuat kesepakatan dengan Prancis melalui perjanjian Sykes-Picot, yang baru diketahui publik sekitar pada 1917 setelah dibocorkan oleh pemerintahan Bolshevik Rusia.

Perjanjian ini bertentangan dengan janji Inggris kepada Sharif Hussein dan memicu ketegangan antara kedua pihak. Tak lama setelah itu, Inggris kembali mengkhianati bangsa Arab melalui Deklarasi Balfour pada 2 November 1917. Inggris secara resmi menyatakan dukungan bagi pendirian negara Yahudi di Palestina melalui surat kepada tokoh Zionis, Baron Rothschild. Deklarasi ini mengabaikan keberadaan dan hak penduduk Arab Palestina yang telah lama mendiami wilayah tersebut, sekaligus menanam benih konflik panjang yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Pasca perang dunia I dan tumbangnya kekhalifahan Utsmaniyah, wilayah Timur Tengah dibagi-bagi oleh Liga Bangsa-Bangsa tanpa memperhatikan batas etnis, geografis, dan agama. Tujuan pembagian ini bukan untuk stabilitas, melainkan untuk melemahkan solidaritas Arab agar mudah dipecah belah (Fuad Nur Zaman, 2025).

Ketentuannya pembagian ini adalah sebagai berikut: 1) Rusia harus mengakuisisi provinsi Armenia Erzurum, Trebizond (Trabzon), Van, dan Bitlis, dengan beberapa wilayah Kurdi di Tenggara, 2) Prancis harus mengakuisisi Lebanon dan pesisir Suriah, Adana, Kilikia, dan pedalaman yang berbatasan dengan bagian Rusia, pedalaman itu termasuk Aintab, Urfa, Mardin, Diyarbakir, dan Mosul, 3) Inggris Raya harus mengakuisisi Mesopotamia selatan, termasuk Bagdad, dan juga pelabuhan Mediterania Haifa dan Akko (Acre), 4) antara akuisisi Prancis dan Inggris harus ada konfederasi negara-negara Arab atau satu negara Arab independen, yang dibagi menjadi wilayah pengaruh Prancis dan Inggris, 5) Alexandretta (Iskenderun) harus menjadi pelabuhan bebas; dan (6) Palestina, karena tempat-tempat suci, harus berada di bawah rezim internasional (Redaksi, 2022).



Gambar 1. Peta Wilayah Pembagian Arab Sumber Gambar: <https://silverwars10h.weebly.com>

Warisan persekongkolan kolonial itu masih terasa hingga hari ini, tercermin dalam konflik berkepanjangan di Palestina, Suriah, Irak, dan Yaman, konflik yang sebagian besar berakar pada batas-batas negara buatan yang ditetapkan tanpa legitimasi rakyat, serta terus diperparah oleh intervensi kekuatan luar Arab. Beberapa dampak utama akibat perjanjian ini: (1) ketidakstabilan politik, (2) pembagian wilayah secara sepihak, (3) ketegangan antar-kelompok, (4) penentangan nasionalis dan gerakan kemerdekaan, (5) tanda kolonialisme dan campur tangan asing (Fauzan Ibnu P, 2023). Campur tangan asing barat juga disebabkan oleh dominasinya di bidang industri, teknologi, politik, dan militer, hampir tidak ada bangsa Arab yang tidak terpengaruh oleh intrusi kolonial Barat pada pergantian abad ke-20. Selain itu, superioritas Barat menjajah, menduduki, dan menggulingkan pemerintahan negara Islam yang ada saat itu (M. Khidri Rahmad Dini, Mirnawati, 2023).

Pengertian dan Interpretasi Difitisme Bangsa Arab

Istilah difitisme berasal dari bahasa Prancis *défaitisme*, yang berarti sikap pesimis dan menyerah sebelum bertindak atau berjuang. Dalam konteks politik dan sosial, difitisme merujuk pada sikap mental kolektif suatu bangsa atau kelompok yang merasa kalah sebelum pertempuran dimulai, sehingga tidak memiliki dorongan untuk melawan, membela, atau mempertahankan nilai-nilai dan kedaulatan sendiri. Dalam Dunia Arab, difitisme berkembang tidak hanya sebagai respons terhadap kekalahan militer (seperti dalam konflik Arab-Israel), tetapi juga sebagai akibat dari kegagalan institusi, korupsi sistemik, dominasi kekuatan asing, serta ketidak berdayaan masyarakat dalam menentukan arah masa depannya sendiri. Difitisme diinternalisasi melalui trauma sejarah, kekalahan beruntun dalam konflik, dan kegagalan negara-negara Arab dalam membangun sistem politik yang stabil dan berdaulat. Difitisme ini tidak hanya terjadi pada level elite politik, melainkan juga meresap ke dalam kesadaran kolektif suatu masyarakat. Karakteristik utama dari difitisme Arab antara lain: (1) Pasifisme politik yaitu menyerah pada dominasi eksternal atau otoritas internal tanpa perlawanan berarti, (2) Inferioritas budaya yaitu merasa budaya asing lebih unggul dan meremehkan warisan budaya lokal, (3) Kekosongan ideologis yaitu tidak adanya visi

kolektif yang kuat tentang masa depan dunia Arab, (4) Fragmentasi solidaritas melemahnya rasa kebersamaan dan solidaritas antarnegara atau kelompok etnik atau agama.

Difitisme di bangsa Arab tidak muncul tiba-tiba, namun merupakan hasil dari proses historis yang sangat panjang. Kegagalan negara-negara Arab dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatan, khususnya dalam perang Arab-Israel, menjadi titik balik munculnya pesimisme kolektif. Lahirnya Negara Israel yang berdaulat pada tahun 1948 merupakan babak baru dalam peta politik dunia, khususnya di Timur Tengah. Israel kemudian menjadi permasalahan utama selain masalah minyak bumi, keduanya kemudian menjadi dua faktor penyebab terpenting atas masuknya berbagai kepentingan dan kekuatan global di Timur Tengah. Semua itu semakin menghadirkan ketidakstabilan politik keamanan di Timur Tengah terlebih lagi ketika eksistensi dan peran Israel kemudian menjadi masalah internasional. Turunnya kekuatan-kekuatan politik dan militer internasional secara langsung juga menambah kompleksnya permasalahan bangsa Arab (Abdul Jalil, 2013). Penegakkan juga merupakan bagian dari rangkaian strategi zionisme barat untuk tujuan mengamankan sumber-sumber dan jalur distribusi minyak bumi, sekaligus sebagai basis kepentingan Barat di seluruh wilayah Arab. Sampai hari ini ketika kita berbicara mengenai kestabilan politik di Timur Tengah, maka mau tidak mau kita juga akan berurusan dengan keberadaan penting suatu negara kecil dengan peran besar di wilayah tersebut yaitu Israel. Sejak lahirnya Israel, negara-negara Arab beraliansi menentangnya dan pernah mencoba mengerahkan kekuatan militer untuk menyerang negara kecil ini, tapi selalu gagal. Bahkan sampai hari ini, energi umat islam di dunia banyak disita oleh ulah nakal Israel (Abdul Jalil, 2013).

Kekalahan berulang, kemudian ditambah dengan korupsi dan represivitas rezim-rezim otoriter Arab, menciptakan kondisi psikologis dan sosial yang merangsang lahirnya sikap apatis, sinis, dan tunduk terhadap kekuatan eksternal. Difitisme juga diperkuat oleh narasi global yang menggambarkan dunia Arab sebagai kawasan krisis, radikal, atau tertinggal. Sebuah narasi yang lama kelamaan diterima dan dipercayai oleh sebagian masyarakat Arab sendiri. Selama dekade-dekade terakhir, proses ini diperparah oleh intervensi militer asing, perang saudara, dan kekacauan politik pasca-Arab Spring, yang memperkuat persepsi bahwa perubahan dari dalam adalah mustahil, dan kekuatan luar selalu lebih dominan. Di sisi lain, sebagian besar media swasta juga cenderung memposisikan kekuatan Barat sebagai solusi atas permasalahan internal, tanpa kritik yang memadai terhadap intervensi eksternal. Dalam pidato politik, difitisme sering kali dimanipulasi oleh rezim otoriter untuk membenarkan status quo. Rakyat diarahkan untuk tidak mempercayai potensi perubahan dari bawah atau dari dalam, dan diarahkan untuk menerima dominasi elit dengan dalih stabilitas. Akibatnya, muncul pola pikir kolektif bahwa perlawanan adalah sia-sia, dan perubahan hanyalah utopia.

Pada saat banyak wilayah bangsa Arab jatuh ke tangan Barat, momentum perlawanan dan semangat kemerdekaan juga timbul di berbagai negara Islam. Perjuangan untuk meraih kemerdekaan tidak hanya menjadi isu politik semata, tetapi juga mencakup aspek identitas dan kebudayaan umat Islam. Proses ini memunculkan gelombang nasionalisme di kalangan masyarakat Muslim, yang merasa perlu untuk mempertahankan jati diri dan warisan budaya mereka. Seiring dengan penjajahan Barat yang melanda sebagian besar dunia Islam, umat Muslim mulai menyadari pentingnya bersatu dan menggagas upaya kolektif untuk mendapatkan kemerdekaan. Perasaan solidaritas antar-negara Muslim menjadi semakin kuat, dan hal ini tercermin dalam berbagai gerakan kemerdekaan yang bermunculan di seluruh dunia Islam. Pentingnya mempertahankan identitas dan kebudayaan menjadi pendorong utama umat Islam untuk bersatu melawan penindasan kolonial (Muhammad Basri, Bagus Surodipo, Nur Fadillah, 2024).

Mereka menyadari untuk mencapai kemerdekaan politik, mereka juga perlu menjaga dan memperkuat akar budaya dan nilai-nilai Islam yang menjadi bagian dari identitas mereka. Hal inilah

sebabnya mengapa perjuangan kemerdekaan di berbagai negara Islam tidak hanya mengusung isu politik, tetapi juga mengangkat isu-isu kultural dan identitas. Ketika masyarakat Muslim memahami bahwa kemerdekaan mereka tidak hanya berkaitan dengan urusan politik, tetapi juga melibatkan pemeliharaan identitas budaya dan agama, semangat perlawanan semakin menguat. Proses ini tidak hanya melibatkan pemimpin politik, tetapi juga intelektual, ulama, dan masyarakat umum yang secara bersama-sama berjuang melawan hegemoni dan penindasan kolonial. Dengan demikian, pada era penjajahan Barat, perjuangan kemerdekaan di dunia Islam bukanlah sekadar upaya politik semata. Ini merupakan gerakan besar yang menggabungkan aspirasi politik, semangat nasionalisme, dan keinginan untuk mempertahankan identitas dan keb (Muhammad Basri, Bagus Surodipo, Nur Fadillah, 2024).

Dampak Difitisme Terhadap Geobudaya dan Geopolitik Arab

Difitisme telah membawa dampak serius terhadap identitas budaya kolektif masyarakat Arab. Ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai budayanya sendiri, yang terjadi bukan hanya krisis identitas, melainkan juga kebingungan arah historis. Dalam konteks dunia Arab, difitisme menyebabkan marginalisasi terhadap warisan intelektual dan kebudayaan Islam-Arab klasik yang dahulu menjadi mercusuar peradaban dunia. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Arab mengalami apa yang disebut sebagai disorientasi budaya, antara ingin menjadi bagian dari modernitas global (yang kerap dipersepsikan sebagai Barat) dan tetap mempertahankan akar budaya lokal. Dalam situasi seperti ini, budaya luar sering dianggap lebih maju, rasional, dan solutif, sementara budaya lokal dianggap stagnan, usang, dan penuh dengan konflik. Erosi identitas ini pada akhirnya melemahkan kohesi sosial. Masyarakat Arab cenderung terpecah dalam identitas sektarian, suku, atau etnis sempit. Ketika identitas nasional kehilangan makna, maka fragmentasi sosial menjadi tidak terelakkan. Difitisme bukan hanya melemahkan mentalitas masyarakat, tetapi juga memecah solidaritas sosial, menjadikan persatuan Arab sebagai wacana kosong tanpa praksis.

Difitisme tidak hanya lahir dari dalam, tetapi juga diperkuat oleh kekuatan global melalui berbagai cara. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui narasi internasional yang terus menggambarkan Dunia Arab sebagai kawasan gagal, penuh konflik, dan tidak memiliki masa depan. Media global dan kebijakan luar negeri negara-negara adidaya turut membentuk persepsi ini. Dalam konteks ini, intervensi asing sering dibingkai sebagai misi penyelamatan atau stabilisasi, bukan sebagai bentuk hegemoni atau kontrol geopolitik. Hal ini membuat sebagian besar masyarakat Arab justru melihat kekuatan luar sebagai solusi, bukan ancaman sebuah bentuk internalisasi difitisme. Selain itu, bantuan luar negeri, kerja sama militer, dan ketergantungan ekonomi terhadap kekuatan asing memperdalam subordinasi Dunia Arab. Negara Arab yang seharusnya bisa membentuk blok kekuatan geopolitik mandiri justru saling berlomba menjadi sekutu strategis kekuatan luar, bukan satu sama lain. Meski difitisme meluas, tidak sedikit reaksi intelektual dan sosial yang muncul sebagai bentuk perlawanan.

Banyak akademisi, budayawan, dan aktivis Arab mengidentifikasi bahwa difitisme sebagai penyakit ideologis yang mengancam eksistensi bangsa Arab. Gerakan sosial pasca-Arab Spring, meskipun belum menghasilkan perubahan struktural yang signifikan, mencerminkan adanya keinginan kuat untuk bangkit dari rasa inferioritas dan dominasi struktural. Namun, gerakan ini masih menghadapi hambatan besar berupa represi politik, krisis ekonomi, serta lemahnya solidaritas lintas negara. Narasi alternatif terhadap difitisme masih berada di ruang-ruang akademik dan diskusi intelektual, belum sepenuhnya mengakar ke dalam kesadaran kolektif masyarakat umum. Dalam hal ini, difitisme beroperasi sebagai bentuk hegemoni

kultural, di mana masyarakat tidak lagi percaya pada kemampuan internal bangsa sendiri dan menggantungkan harapan pada kekuatan asing, bahkan jika kekuatan tersebut justru berperan menciptakan krisis.

1. Dampak Defitisme Terhadap Geopolitik Arab

Difitisme juga berdampak langsung pada perubahan konstelasi geopolitik di kawasan Arab. Ketika negara Arab kehilangan kepercayaan diri untuk memimpin kawasan dan bersatu dalam menghadapi tantangan eksternal, maka kekuatan asing akan dengan mudah mengisi kekosongan tersebut. Saat ini, banyak negara Arab tidak lagi menjadi subjek aktif di dalam arena internasional, melainkan menjadi objek tarik menarik kepentingan global. Intervensi militer asing di Irak, Suriah, dan Libya, serta keterlibatan kekuatan besar dalam konflik Yaman dan Palestina menunjukkan betapa lemahnya posisi geopolitik negara-negara Arab secara kolektif. Penggantian kekuasaan lokal dengan administrasi kolonial ini juga sering kali dilakukan dengan cara kekerasan dan penindasan. Gerakan-gerakan nasionalis yang muncul sebagai respons terhadap kolonialisme sering kali ditekan dengan brutal, seperti yang terlihat dalam revolusi revolusi di Aljazair dan Tunisia. Penindasan ini tidak hanya menghan-curkan gerakan nasionalis tetapi juga memperdalam kebencian terhadap kekuasaan kolonial, yang berdampak pada hubungan internasional dan politik pasca kolonial (Halik, Abdul Chadjib, Hasaruddin, 2024).

Selain itu, hubungan antar negara Arab yang didasarkan pada rivalitas politik dan kepentingan ekonomi jangka pendek justru memperparah keretakan. Ketidak hadirannya kepemimpinan regional yang visioner semakin membuka peluang bagi kekuatan non-Arab seperti Iran, Turki, dan Israel untuk memainkan peran dominan dalam dinamika kawasan. Secara geopolitik, kawasan Dunia Arab merupakan wilayah yang strategis karena posisinya yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa serta kaya akan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas. Sejak runtuhnya Kekhalifahan Utsmani dan dimulainya sistem negara-bangsa pasca kolonialisme, Dunia Arab mengalami fragmentasi politik yang tajam. Pembentukan negara modern di wilayah ini sebagian besar ditentukan oleh kekuatan kolonial melalui perjanjian seperti *Sykes-Picot* sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Fragmentasi tersebut diperkuat oleh konflik sektarian, rivalitas antarnegara, dan intervensi kekuatan global seperti Amerika Serikat, Rusia, dan kekuatan regional seperti Iran dan Turki. Dalam konteks ini, difitisme muncul sebagai salah satu faktor internal yang melemahkan posisi tawar Dunia Arab dalam percaturan geopolitik global.

2. Dampak Defitisme Terhadap Geobudaya Arab

Geobudaya dapat kita jelaskan sebagai salah satu cabang ilmu geografi yang objek kajiannya adalah keruangan manusia. Menurut Suharyono dan Moch Amien geobudaya ilmu pengetahuan yang mempelajari persebaran dan kera-gaman kerja budaya manusia yang telah menentukan aspek-aspek dan inti lanskap. Di mana dengan mempelajari ilmu ini kita bisa memahami kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki sekarang (Mentari Januari, 2022). Istilah geobudaya juga mengacu pada dinamika kebudayaan yang dipengaruhi oleh faktor geografis dan politik, serta memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas suatu kawasan. Dalam hal ini dunia Arab memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan Islam. Namun dalam era modern, nilai-nilai budaya tersebut mengalami erosi akibat penetrasi budaya asing, dominasi ekonomi global, dan krisis identitas. Difitisme berkontribusi dalam proses ini dengan menciptakan sikap inferior terhadap nilai-nilai lokal dan glorifikasi terhadap budaya luar.

Hal inilah yang memicu terjadinya krisis dalam reproduksi nilai tradisional, mengaburkan identitas kolektif Arab, dan menciptakan polarisasi budaya di tengah masyarakat. Defitisme ini berdampak pada budaya dan pendidikan di dunia Islam. Bahasa, sistem pendidikan, dan nilai-nilai Barat yang diperkenalkan

yang sering kali dengan mengorbankan tradisi lokal. Misalnya di Mesir, sekolah-sekolah misi memperkenalkan kurikulum Barat yang berbeda dari pendidikan tradisional Islam. Pengenalan nilai-nilai dan pendidikan Barat ini sering kali menyebabkan hilangnya tradisi lokal dan identitas budaya. Pendidikan Barat yang diterapkan di sekolah-sekolah misi dan universitas-universitas ini tidak hanya mengubah cara pandang generasi muda tetapi juga mengikis penghargaan terhadap nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Ini menciptakan dualisme budaya yang menyulitkan masyarakat untuk mempertahankan identitas mereka di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang didorong oleh kolonialisme (Halik, Abdul Chadjib, Hasaruddin, 2024)

Pemikiran Arab Pasca Defitisme

Mengapa dunia Islam dapat bangkit dengan cepat dan berkembang selama beberapa abad, namun mengalami penurunan yang signifikan setelahnya, kehilangan semangat vitalnya? Tidak hanya menjadi daerah kolonialisme, tetapi juga menghadapi kesulitan memberikan respons efektif terhadap tantangan yang dihadapinya. Memang, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini memerlukan penelusuran sejarah yang sangat mendalam untuk memahami asal-usul kemerosotan. Meskipun tugas berat, jawaban-jawaban tersebut sangat krusial (Mindani, Ismail, Purwanto Revaldo, Hidayat et al., 2024). Pertama kalinya pasca 1967, utamanya pada tahun 1970 dan 1980-an, terdengar istilah Islamis atau fundamentalis dan istilah self-criticism atau Marxist selfcriticism. Hal ini merupakan akibat dari kekalahan perang Arab sekaligus mengindikasikan adanya kematangan dalam ranah pemikiran intelektual Arab pada era 1970 dan 1980-an. Pada era Kebangkitan Arab Pertama pertanyaan yang muncul adalah “mengapa kita (bangsa Arab-Muslim) mengalami kemunduran sementara yang lain (Barat-Kristen) mengalami kema-juan?” maka pertanyaan yang muncul di kalangan intelektual Arab era Kebangkitan Kedua adalah “mengapa kita (Arab-Muslim, Dunia Ketiga) gagal merealisasikan kebangkitan kita? Hal ini berarti bahwa pemikiran Arab sedang menghadapi era kebangkitan kedua seperti halnya kebangkitan pertama pada abad ke-19 Masehi (Yoyo, Heddy Shri, Munawar Manshur, 2012).

Beberapa karya yang lahir pasca kekalahan Arab 1967 yang dianggap sebagai krisis dunia arab umumnya bermuara pada kritik diri untuk menempatkan *turath* di posisi yang mengutungkan bagi bangsa Arab. Para ahli memetakan pandangan kontemporer atas tradisi dan modernitas terutama pasca kekalahan arab 1967 ke dalam beberapa kelompok. Issa J. Boullata membagi menjadi tiga kelompok. Pertama kelompok yang menawarkan wacana transformatif yang menginginkan dunia arab lepas sama sekali dari tradisi masa lalunya, karena tradisi masa lalu tidak lagi memadai bagi kehidupan kontemporer. Kedua kelompok yang menawarkan wacana reformatif, yang menginginkan sikap akomodatif dengan mereformasi tradisi yang selama ini dihadapi. Ketiga kelompok yang disebut idealis-totalistik yang menginginkan agar dunia arab kembali kepada Islam murni, khususnya aliran salaf dengan slogan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Ro'uf, 2018). Ada juga kelompok intelektual pragmatis dalam melihat peranan agama dan lebih menonjolkan rasa persatuan nasional. Kecenderungan ini disebut sebagai kritisisme nasional (Yoyo, 2017).Selanjutnya setelah masa kolonialisme Arab, banyak bangsa Arab yang mengembangkan identitas nasional mereka dengan agama. Peninggalan-peninggalan artefak dan seni pada masa kejayaan Islam sering digunakan menjadi simbol negara mereka untuk identitas nasional mereka di masa modern.

Melihat perjalanan bangsa Arab yang sangat panjang, maka politik dan pemerintahan negara Arab Saudi sekarang sudah menjadi negara berdaulat setelah Abdul Azis bin Abdurrahman bin Faisal al-Saud secara resmi memprok-lamasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi, dan Arab adalah negara yang bentuknya kerajaan. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi negara, dan tidak ada partai politik yang berdiri di

negara tersebut karena tidak diizinkan oleh negara, dan sistem kekuasaan negara terdiri atas lembaga yudikatif, legislatif, dan yudikatif, para menteri langsung diamanahi oleh raja dan biasanya para menteri diangkat dari kerabat raja. Arab Saudi melakukan reformasi di bidang pendidikan untuk dijadikan sarana dalam melaksanakan reformasi ekonomi, Arab Saudi membuat kebijakan untuk wajib sekolah 12 tahun dan menjamin seluruh biaya pendidikan masyarakatnya. Dan mereka juga membuat kebijakan untuk mengintegrasikan ilmu agama dengan sosial-humanira dan sains-teknologi untuk mengembangkan atau menambah wawasan masyarakatnya, dan mereka juga mengirim para pelajarnya ke luar negri. Mereka juga mereformasi semua perguruan tinggi dengan menyewa tenaga pendidik dari luar negri, dan membuat adanya transfer ilmu dengan negara asing yang menambah dan mengembangkan wawasan masyarakatnya (Fityani Pereniaa, 2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bangsa Arab pernah meraih masa kejayaannya yaitu pada abad ke-7 hingga abad ke-14. Namun setelah abad ke-14, peradaban bangsa Arab kemudian mengalami kemerosotan luar biasa bahkan sampai saat sekarang ini. Di era modern kemerosotan tersebut semakin parah setelah adanya perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916, yang menjadi dasar lahirnya negara-negara Arab modern yang rawan terjadi konflik internal dan ketergantungan kepada eksternal. Lahirnya Negara Israel Raya yang berdaulat pada tahun 1948 juga menjadi babak baru dalam peta politik dunia. Sebagai konsekuensinya, masyarakat Arab mengalami apa yang disebut sebagai disorientasi budaya, antara ingin menjadi bagian dari modernitas dan tetap mempertahankan akar budaya lokal.

Kemudian lahirnya apa yang disebut dengan difitisme arab yang berdampak langsung pada perubahan konstelasi geopolitik di kawasan Arab. Saat ini, banyak negara Arab tidak lagi menjadi subjek aktif di dalam arena internasional, melainkan menjadi objek tarik menarik kepentingan global. Misalnya Intervensi militer asing di Irak, Suriah, dan Libya, serta keterlibatan kekuatan besar dalam konflik Yaman dan Palestina menunjukkan betapa lemahnya posisi geopolitik negara-negara Arab secara kolektif. Seusai perang Arab-Israel tahun 1973, bangsa Arab mulai mengubah pola pikir terhadap Israel dan Amerika Serikat. Bangsa Arab mulai menerima negara Israel sebagai negara tetangga dan bagian dari wilayah Timur Tengah, serta mulai mendekati pula AS sebagai sekutu Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalil. (2013). Runtuhnya Dunia Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'an*, Vol. 9, No, 34.
- Ahmad Yasin. (2025). *Sejarah Perang Enam Hari: Ketika Israel Dikepung 4 Negara Arab*. Diakses 20 Oktober 2025 di <https://www.kompas.com>.
- Fauzan Ibnu P. (2023). *Perjanjian Sykes Picot: Awal Mula Pecahnya Umat Islam di Timur Tengah*. Diakses tanggal 17 Oktober 2025 di laman <https://zakat.or.id>
- Fityani Pereniaa, N. H. (2025). Perkembangan Peradaban Arab: Jejak Sejarah Dan Tantangan Di Era Globalisasi. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, Vol. 3, No, 47. <https://doi.org/DOI:10.61476/769mhx21>
- Fuad Nur Zaman. (2025). *Sykes-Picot: Perjanjian Rahasia yang Merusak Persatuan Dunia Islam*. di akses 20 Oktober 2025 di laman <https://blog.npc.id>

- Halik, Abdul Chadjib, Hasaruddin, S. (2024). Dampak Kolonialisme Barat Terhadap Dunia Islam Pada Abad Ke- 17 Hingga Ke-19: Analisis Sejarah dan Implikasi Kontemporer. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol.3, No., 5308. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5134>
- M. Khidri Rahmad Dini, Mirnawati, D. P. L. (2023). Pemikiran Modern Kontemporer Islam: Masa Kemunduran Islam Dan Penjajahan Barat Terhadap Dunia Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 2 No., 266. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.55606/religion.v1i2.83>
- Mentari Januari. (2022). *Pengertian Geografi Budaya dan Perkembangannya Materi Geografi Kelas 11*. Diakses 17 Oktober 2025 di laman <https://www.zenius.net>
- Mindani, Ismail, Purwanto Revaldo, Hidayat, S., Nadia, R., & Khadaf, M. (2024). Kemunduran Peradaban Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, Vol. 4 No., 162.
- Muhammad Basri, Bagus Surodipo, Nur Fadillah, N. S. (2024). Penjajahan Barat atas Dunia Islam dan Perjuangan Kemerdekaan Negara-Negara Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, 22. <https://doi.org/olome> 1, Nomor 6, J
- Musthafa Abd Rahman. (2019). *Meratapi Kemunduran Bangsa Arab*. Diakses 7 September 2025 di laman <https://www.kompas.id>
- Redaksi. (2022). *16 Mei 1916, Sykes–Picot Agreement: Perjanjian yang membagi Utsmaniyah dan menjadi awal konflik Timur Tengah hingga saat ini*. Diakses pada tanggal 28 September 2025 di laman <https://zonaperang.com>
- Ro'uf, A. M. (2018). *Kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid Al-Jabiri*. LKiS Yogyakarta.
- Sudin Yamani, Indo Santalia, W. G. (2022). Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No., 4039. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3632>
- Yahya, U. (2015). Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun Di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam. *Jurnal Islamika*, Volume 15, 231.
- Yoyo, Heddy Shri Ahimsa Putra dan Fadlil Munawar Manshur, S. M. S. (2012). Tren Pemikiran Intelektual Muslim Kontemporer Di Timur Tengah Pasca-Difitisme 1967. *Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, VOLUME 2 N, 299. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.22146/kawistara.3941>
- Yoyo. (2017). *Pemikiran Arab: Dinamika Intelektual, Ideologi, dan Gerakan*. SOCIALITY.